



## MANAJEMEN SEKOLAH MODEL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

Indra Pamala\*, Slamet Winaryo, Teti Berliani  
Universitas Palangka Raya, Palangka Raya

Info Artikel	Abstrak
<p><b>Riwayat Artikel:</b></p> <p>Diterima: 27 April 2021 Direvisi: 3 Mei 2021 Disetujui: 3 Juni 2021</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Manajemen, Sekolah Model, Pendidikan Dasar.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Manajemen Sekolah Model pada Jenjang Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Menteng Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu: Kepala Sekolah, Ketua TPMPS dan Guru-guru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengabsahan data menggunakan Teknik Triangulasi dan <i>Member Check</i>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan SPMI meliputi: (a) Sosialisasi program SPMI, (b) Pembentukan TPMPS dan Tim Monev, (c) Memetakan mutu, (d) Membuat peta masalah, e) Membuat rencana aksi, (f) Membuat jadwal, dan (g) Menentukan anggaran; (2) Pengorganisasian SPMI: (a) Pengawas: Dinas Pendidikan, TPMPD, Pengawas Sekolah, Penanggung jawab: Kepala Sekolah, Pengelola: TPMPS dan Tim Monev; (3) Pelaksanaan SPMI dilakukan dengan mengikuti jadwal, menentukan Sarpras, mengadakan kegiatan <i>workshop</i> dan TOT; (4) Pengawasan SPMI dilakukan oleh: kepala sekolah, TPMPD, TPMPS, Tim Monev dan Pengawas Sekolah; (5) Evaluasi SPMI dilakukan dengan menentukan jadwal, membuat instrumen/alat ukur, melakukan peninjauan kembali, dan menyusun RTL.</p>
<p><b>Korespondensi:</b></p> <p>Indra Pamala* Universitas Palangka Raya E-mail: <a href="mailto:indra.ir27@gmail.com">indra.ir27@gmail.com</a></p>	<p><b>Abstract</b></p> <p>This study aims to describe the Model of School Management at SD Negeri 1 Menteng, Palangka Raya City. This study uses a descriptive qualitative approach. Sources of data in this research are: Principal, Head of TPMPS and teachers. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. Data analysis uses: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. Validation of data using Triangulation Techniques and Member Check. The results of this study showed that: (1) SPMI planning includes: (a) Socialization of the SPMI program, (b) Establishment of TPMPS and the Monitoring and Evaluation Team, (c) Mapping quality, (d) Making problem maps, e) Making action plans, (f) ) Make a schedule, and (g) Determine the budget; (2) Organization of SPMI: (a) Supervisor: Education Office, TPMPD, School Supervisor, Person in Charge: Principal, Manager: TPMPS and Monev Team; (3) The implementation of SPMI is carried out by following the schedule, determining the Sarpras, holding workshops and TOT; (4) SPMI supervision is carried out by: school principals, TPMPD, TPMPS, Monev Team and School Supervisors; (5) SPMI evaluation is carried out by determining the schedule, making instruments/measurements, conducting reviews, and making RTL.</p>



### PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, pendidikan merupakan peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan sebuah bangsa. Keberadaan pendidikan yang sangat penting telah diakui dan sekaligus memiliki

legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan untuk meningkatkan potensi diri dan memiliki wawasan yang luas.

Dengan pendidikan yang merata, akan memberikan kesempatan pada setiap warga Negara untuk mengembangkan potensi dirinya dalam hal penguatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, mempunyai kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia serta mengembangkan keterampilan diri dalam bermasyarakat, ber-Negara dan ber-Bangsa. Seperti Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa: "Tujuan pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Dalam perkembangan pembangunan Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang handal, setiap warga Negara berkeharusan untuk mengenyam bangku pendidikan sesuai dengan kompetensi mereka, karena pendidikan adalah hal yang strategis bagi bangsa dalam pengembangan potensi masyarakat; Sehingga pendidikan seharusnya digunakan untuk mendidik seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa memandang Ras dan Agama. Bukan hanya digunakan oleh beberapa golongan tertentu saja. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk mengatur sistem pendidikan sebagai proses mencerdaskan anak Bangsa. Selain itu, pendidikan seharusnya memberikan kesadaran bagi masyarakat akan potensi individu yang dimiliki kemudian merangsang mereka supaya menggunakan potensi tersebut untuk nilai kemanusiaan (Idrus, 2012).

Pendidikan yang baik perlu membahas tentang faktor-faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, fasilitas serta lingkungan. Jika faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik dan optimal maka pendidikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik juga (Kurniawan, 2017). Supaya tujuan pendidikan dapat tercapai, dibutuhkan semua unsur yang terkait dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan, pemerintah telah berusaha menyediakan baik saran dan prasarana pendidikan, termasuk kebijakan tentang sekolah model supaya dapat mencapai dan melampaui standar nasional pendidikan sehingga dapat melaksanakan setiap pokok dan fungsi yang ada di sekolah agar peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai.

Definisi sekolah model menurut Juknis Dikdasmen (Kemendikbud, 2017) adalah sekolah yang dipilih dan ditetapkan LPMP menjadi sekolah acuan dengan menerapkan penjaminan mutu secara mandiri. Menurut Aris (2019) sekolah model juga dapat disebut sekolah rintisan yang diarahkan untuk mampu berkomitmen menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan menunjukkan perubahan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan setelah menerapkan penjaminan mutu. Dengan adanya gambaran ini diharapkan sekolah lain akan menerapkan penjaminan mutu sampai terjadi sebuah pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sekolah model merupakan amanat dari Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah. Pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa: "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan". Lalu Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa: "Sistem Penjaminan Mutu Internal Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan

pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan”.

Sesuai dengan isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dikembangkan agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik pada segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan. SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan.

SPMI yang selanjutnya disebut sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SNP. Satuan pendidikan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan hingga terbangun budaya mutu di satuan pendidikan. Budaya mutu akan mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus sehingga mutu pendidikan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu secara bertahap hingga dipenuhinya standar yang telah ditetapkan atau bahkan melampaui standar tersebut.

Di lembaga pendidikan, sistem penjaminan mutu dijalankan oleh seluruh komponen dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sistem penjaminan mutu ini disebut sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Sistem penjaminan mutu ini dikembangkan dan dievaluasi secara berkelanjutan dengan satuan pendidikan, dituangkan dalam pengelolaan, dan disosialisasikan kepada segenap pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar SPMI dapat diimplementasikan oleh satuan pendidikan dengan optimal maka LPMP mengembangkan sekolah yang akan menerapkan penjaminan mutu secara mandiri yaitu sekolah model. Sekolah model menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut.

Tujuan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah untuk mengembangkan percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah sekolah menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, sekolah meningkatkan mutu sesuai SNP, dan sekolah berbudaya mutu.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD Negeri 1 Menteng Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa SD Negeri 1 Menteng ditetapkan sebagai sekolah model sejak tahun 2019; hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah Nomor: 123/D7.22/KP/2019 tentang penetapan sekolah Model Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Penerima Bantuan Pemerintah Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019. SD Negeri 1 Menteng berakreditasi ‘A’, dengan adanya program seperti ini sekolah lebih termotivasi dan dapat kesempatan untuk bersama sama melakukan penjaminan mutu internal dengan sekolah imbas serta berbagi pengalaman yang baik agar pemerataan mutu pendidikan yang ada di sekolah-sekolah dapat merata. Manfaat yang dirasakan sekolah sangat positif, hal ini dikuatkan dengan pernyataan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Kota Palangka Raya bahwa dilihat dari progresnya sekolah mempunyai komitmen untuk maju dan berkembang ditambah adanya bimbingan serta dukungan dari pihak LPMP yang membantu setiap proses di dalamnya ini menambah semangat sekolah menjadi lebih tinggi. Sekolah termotivasi untuk lebih berkembang dan sekolah menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan tentang Manajemen Sekolah Model pada Jenjang Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Menteng Kota Palangka Raya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Arikunto (1998) menyatakan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Gunawan 2014) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Dari uraian di atas mengenai pengertian penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini yaitu: Kepala sekolah, Ketua tim penjamin mutu pendidikan sekoah (TPMPS) dan satu orang Guru SD Negeri 1 Menteng Kota Palangka Raya. Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari segi teknik atau cara pengumpulan data, secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Teknik observasi dilakukan secara langsung tentang kegiatan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Riduwan (2013) bahwa observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Menurut Kartono (dalam Gunawan, 2014) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan suatu tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi peneliti gunakan untuk mengumpulkan data sekunder; data tertulis yang memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti yakni mengenai data lokasi penelitian, data keadaan.

Arikunto (2002) menyatakan metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Menurut Sugiyono (2013) yang dimaksud analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data menggunakan: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, dan (4) Penarikan Kesimpulan. Pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi dan *member check*. Moleong (2012) menyatakan untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Salah satunya kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan) dengan menggunakan teknik pemeriksaan seperti: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian kasus negatif, (7) pengecekan anggota. Sugiyono (2013) menyatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sedangkan *member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check*

adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Berdasarkan hasil yang didapat pada saat penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan SPMI di sekolah meliputi kegiatan sebagai berikut: (a) Mensosialisasikan program SPMI kepada seluruh anggota dalam siklus internal sekolah, (b) Membentuk tim penjaminan mutu pendidikan sekolah (TPMPS) dan tim monev yang bersumber dari anggota dalam internal sekolah, (c) Melakukan pemetaan mutu berdasarkan hasil dari evaluasi diri sekolah (EDS) dan raport mutu, kemudian membuat peta masalah dari hasil pemetaan mutu, (d) menetapkan rencana aksi pemenuhan mutu yang dituangkan ke dalam jadwal kegiatan yang ditentukan secara bersama-sama, (e) penetapan petugas SPMI yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan ketua tim penjaminan mutu pendidikan sekolah yang bertugas mengatur jalannya kegiatan SPMI di sekolah, Guru-Guru dan anggota internal sekolah yang terkait bertugas untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan pemenuhan mutu dengan baik, (f) penetapan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan, (g) penetapan pengawas kegiatan SPMI yaitu berasal dari Dinas Pendidikan Kota dan Pengawas Sekolah, dan (h) Penetapan anggaran kegiatan yang bersumber dari dana BOS yang tertuang dalam RKAS sekolah. Dari temuan penelitian tersebut, sangat terlihat bahwa SPMI yang ada di sekolah sangat terencana dengan baik dan sistematis. Dengan perencanaan yang baik, maka tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai secara optimal. Hal itu sejalan dengan Combs (dalam Andang, 2014) yang menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para bawahan dan masyarakatnya. Sementara itu Handoko (2012) mengungkapkan perencanaan itu diibaratkan sebagai inti manajemen, karena perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang, dan oleh karena itu memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumberdaya-sumberdaya mereka yang terbatas secara paling efisien dan efektif. Lebih lanjut, Cunningham (dalam Rivai & Murni, 2012) mengemukakan perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi, untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Demikian pula, Soetopo & Soemanto (1982) yang mengatakan bahwa dalam bidang pengelolaan ada berbagai langkah atau kegiatan dalam menyusun suatu rencana yaitu sebagai berikut: (a) Menjangkau ke depan untuk memperkirakan keadaan dan kebutuhan dikemudian hari, (b) Menentukan tujuan yang hendak dicapai, (c) Menentukan kebijaksanaan yang ditempuh sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, (d) Menyusun program yang mencakup pendekatan yang ditempuh, jenis dan urutan-urutan kegiatan, (e) Menentukan biaya, dan (f) Menentukan jadwal dan prosedur kerja yang ditempuh.

### **Pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka dapat dijelaskan bahwa pengorganisasian SPMI di SD Negeri 1 Menteng sudah dituliskan secara jelas dengan tujuan agar pengorganisasian sistem penjaminan mutu internal tersebut dapat berjalan secara efektif. Adapun petugas pada kegiatan pengelolaan sistem penjaminan mutu internal yang ada di sekolah meliputi: Kepala sekolah bertugas sebagai penanggung jawab, Ketua tim pengelola bertugas memberikan jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan pemenuhan mutu secara langsung dilapangan dibantu oleh Tim monev dan diawasi oleh Dinas Pendidikan, Tim penjaminan mutu pendidikan daerah dan Pengawas sekolah.

Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi. Pengorganisasian adalah proses penghimpunan SDM, modal dan peralatan, dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan upaya pemaduan sumber daya. Sejalan dengan itu, Hasibuan (2016) menyatakan pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas dimaksud menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan kewenangan yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Terry (dalam Yahya dkk, 2021) berpendapat bahwa pengorganisasian adalah cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Sedangkan menurut Utomo (2021) pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.

### **Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Berdasarkan hasil yang didapati pada saat penelitian maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan SPMI di SD Negeri 1 Menteng Kota Palangka Raya sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal karena terkadang dalam pelaksanaannya tidak konsisten sesuai jadwal yang ditetapkan serta masih terdapat ketidakmerataan penguasaan IT pada sebagian guru. Sesuai dengan temuan dalam pelaksanaannya para guru mengadakan kegiatan dengan istilah *Training of trainer* atau TOT untuk berbagi pengetahuan sesama rekan sejawat dalam meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan IT. Untuk menjaga dan memastikan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab akan memberikan teguran dan motivasi agar para guru mampu meningkatkan semangatnya dalam bekerja sama demi kemajuan sekolah dan pemenuhan mutu di sekolah.

Menurut Syarifudin (2009) pelaksanaan merupakan usaha untuk menciptakan kerjasama antara pelaksana kegiatan sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. TOT merupakan pelatihan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang disiapkan untuk menjadi pelatih atau trainer dan meneruskan materi pelatihan tersebut kepada orang lain. Secara umum, training of trainer adalah sebuah proses transfer pengetahuan dan keterampilan agar kecakapannya bertambah atau menguat. Tujuan pelatihan TOT pada intinya adalah agar organisasi atau perusahaan berkembang. TOT memastikan orang-orang dalam organisasi atau perusahaan mengevaluasi kembali pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bekerja, serta meningkatkan kapasitasnya, lewat pembentukan pelatih-pelatih yang baik. Para pelatih atau trainer inilah yang nantinya menjadi agen-agen untuk memastikan hal itu dalam tim masing-masing. Membaiknya kinerja tim, berarti membaik pula kinerja organisasi atau perusahaan.

### **Pengawasan Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Berdasarkan hasil yang didapati saat penelitian dapat dijelaskan bahwa pengawasan sistem penjaminan mutu internal SD Negeri 1 Menteng Kota Palangka Raya yaitu: Pengawasan dilakukan oleh tim penjaminan mutu pendidikan sekolah (TPMPS) dan tim monev yang ditugaskan oleh kepala sekolah yang merupakan penanggung jawab kegiatan, serta dibantu oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah (TPMPD). Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Barnawi & Arifin (2014) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang menjamin kegiatan-kegiatan atau program-program telah berjalan sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan. Pengawasan sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi agar organisasi berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki.

### **Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi sistem penjaminan mutu internal di SD Negeri 1 Menteng Kota Palangka Raya yaitu: proses

awal evaluasi yang dilakukan meliputi penetapan jadwal kegiatan, penyusunan instrumen/alat ukur untuk melakukan evaluasi, dilanjutkan dengan melakukan kegiatan evaluasi dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan perencanaan yang telah dibuat kemudian dari hasil yang diperoleh akan ditindak lanjuti apakah perlu dilakukan perbaikan atau menetapkan pemenuhan mutu baru/penetapan satandar mutu baru untuk ke depannya. Berdasarkan temuan tersebut diketahui bahwa penguasaan IT guru belum merata ditambah pula pelaksanaan kegiatan terkadang tidak konsisten sesuai jadwal. Dalam upaya mengatasi kondisi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan TOT sesama teman sejawat untuk berbagi pengetahuan dalam bentuk bimbingan agar capaian yang belum optimal dapat terpenuhi, menetapkan pengambilan keputusan untuk perkembangan penjaminan mutu internal berikutnya dan membuat laporan hasil kegiatan secara keseluruhan. Proses ini dibantu oleh tim penjaminan mutu pendidikan sekolah, tim monev dan tim penjaminan mutu pendidikan daerah (TPMPD). Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Arikunto & Safrudin (2008) bahwa evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sekolah model merupakan sebuah program yang bertujuan melaksanakan kegiatan SPMI pada satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah model ini dipilih dan ditetapkan oleh LPMP serta diarahkan hingga mampu berkomitmen secara mandiri dalam melaksanakan penjaminan mutu di satuan pendidikan secara berkelanjutan. Perencanaan pengelolaan SPMI di SD Negeri 1 Menteng Kota Palangka Raya direncanakan dengan baik oleh pengelola meliputi: (a) Sosialisasi program SPMI, (b) Pembentukan TPMPS dan tim monev, (c) Pemetaan mutu, (d) Menentukan skala prioritas peningkatan mutu, (e) membuat rencana aksi pemenuhan mutu, (f) penetapan jadwal, dan (g) penetapan anggaran SPMI. Struktur pengelolaan SPMI sudah ditentukan atas kesepakatan bersama. Adapun susunannya meliputi: Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan SPMI, Ketua Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dibantu oleh Tim Monev, serta Pengawasan dilakukan oleh Dinas pendidikan, Tim penjaminan mutu pendidikan daerah (TPMPD) dan pengawas Sekolah. Pelaksanaan SPMI di SD Negeri 1 Menteng sudah berjalan dengan lancar akan tetapi belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari penguasaan IT pada guru yang belum merata dan pelaksanaan kegiatan terkadang tidak konsisten sesuai jadwal yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal serta pelaksanaan kegiatan yang diawasi oleh TPMPS dan tim monev yang ditugaskan oleh kepala sekolah yang merupakan penanggung jawab kegiatan, serta dibantu oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah (TPMPD) dan pengawas sekolah. Evaluasi meliputi: penetapan jadwal dilanjutkan dengan membuat instrumen/alat ukur untuk evaluasi. Dari hasil kegiatan evaluasi ini akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan atau membuat rencana pemenuhan mutu baru. Proses ini juga didampingi oleh tim monev, TPMPS, dan TPMPD. Dari hasil evaluasi yang didapat hingga saat ini penguasaan IT pada guru belum merata dan proses pelaksanaan kegiatan terkadang tidak konsisten sesuai jadwal yang ditetapkan serta tidak adanya keterlibatan orang tua secara aktif dalam pelaksanaan SPMI ini.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak SD Negeri 1 Menteng Kota Palangka Raya yang telah memberikan izin dan kemudahan selama proses berlangsungnya kegiatan penelitian, serta Redaksi *Equity in Education Journal* (EEJ) yang telah memberikan kesempatan artikel peneliti dapat dimuat dalam jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andang. (2014). *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah: Konsep, Strategi & Inovasi Sekolah Efektif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Arikunto, S., & Safrudin, C. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aris, M. (2019). *Implementasi Pengimbasan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Model Sekolah Menengah Pertama (SMP) A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang ke Sekolah Imbas*. Skripsi tidak Dipublikasikan. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Barnawi., & Arifin. M. (2014). *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. (2017). *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. (2017). *Petunjuk Teknis Pengembangan Sekolah Model dan Pola Pengimbasan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Rivai, V., & Murni, S. (2012). *Education Management: Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemanto, W., & Soetopo, H. (1982). *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*. Malang: Usaha Nasional Surabaya Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin. (2009). *Promosi Kesehatan*. Jakarta. CV Trans info Medika.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.